



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2025/Periodik - 2024)

**Status Verifikasi Administratif Lengkap**

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN KEUANGAN  
**UNIT KERJA** : DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SIGIT DANANG JOYO**
2. Jabatan : **KEPALA KANWIL**
3. NHK : **205220**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.400.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/100 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, WARISAN Rp. 1.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/87 m2 di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.200.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **493.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. MOBIL, NISSAN MARCH Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. MOBIL, SUZUKI JIMNY Tahun 1982, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
5. MOTOR, HONDA C70 Tahun 1970, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
6. MOBIL, SUZUKI VITARA Tahun 1992, HASIL SENDIRI Rp. 71.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **649.000.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **---**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **2.081.634.865**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **15.000.000**



Sub Total	Rp.	5.638.634.865
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.638.634.865

---

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.